

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan

Tujuan negara tercantum dalam UUD 1945 adalah membangun kesejahteraan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan perekonomian negara. Membangun lingkungan dan menciptakan rasa aman dan tentram tidak mudah dilakukan karena banyak hambatan dan permasalahan sosial lainnya. Pasal 28G (1) UUD 1945 menegaskan bahwa jaminan keamanan merupakan hak dasar seluruh masyarakat Indonesia. Sejalan dengan tujuan SDGs (*Sustainable Development Goals/SDGs*) adalah untuk menegakkan keamanan individu dan membangun masyarakat yang harmonis, adil, dan mencakup semua (Ervina, 2020). Hambatan dalam menciptakan rasa aman dan tentram kerap disebabkan oleh keadaan sosial masyarakat itu sendiri seperti adanya tindak kriminal. Tindak kriminal menyebabkan dampak negatif ke berbagai sektor dan dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi suatu negara (Fachrurrozi dkk., 2021).

Kriminalitas merupakan salah satu permasalahan serius bagi setiap wilayah karena merugikan banyak orang. Pelaku tindak kriminal melakukan tindakan bermoral, melanggar norma dan aturan baik aturan sosial maupun hukum berlaku (Sari & Azhar, 2019). Tindak kriminal baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan masih marak terjadi dan sulit untuk diatasi (Fachrurrozi dkk., 2021). Tindak kriminal berpotensi menghadapi sanksi sesuai dengan KUHP atau UU lainnya. Faktor pendorong tindak kriminal terbesar adalah sosial, ekonomi, dan niat terselubung dari pelaku (Rahmalia dkk., 2019). Keadaan ekonomi mengharuskan

seseorang harus memiliki pekerjaan dan berpenghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berbagai macam tindak kriminal antara lain pencurian perampokan, penipuan, dan lain sebagainya (Statistik Kriminal Indonesia, 2021)

Di Indonesia, kriminalitas sulit untuk dikendalikan mengingat faktor penyebab kriminalitas sangat beragam mulai dari faktor ekonomi, sosial, dan lain sebagainya (Dulkiah, 2018). Keinginan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan kepuasan mendapatkan hasil lebih daripada hasil dari perbuatan legal juga merupakan faktor utama terjadinya tindak kriminalit. Tingkat kriminalitas di Indonesia tergolong sedang jika dibandingkan dengan negara-negara seperti Amerika, Kolombia, dan Irak. Meskipun demikian, penting untuk mengatasi atau mengendalikan masalah kriminalitas ini agar tidak menghambat proses pembangunan negara (Rahmalia dkk., 2019; Sari & Azhar, 2019).

Data Statistik Kriminalitas Indonesia dari tahun 2018 – 2021 menunjukkan jumlah kasus kriminalitas mengalami penurunan. Sedangkan tahun 2022 kasus kriminalitas meningkat hampir 3 kali lipat dibandingkan tahun 2021. Pada tahun 2020 tercatat lebih dari 32 ribu kasus kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara, 26 ribu kasus di DKI Jakarta, dan lebih dari 17 ribu kasus di Jawa Timur. 3 provinsi tersebut merupakan provinsi dengan jumlah kasus kriminalitas terbanyak pada tahun 2020 dan 2 diantaranya didominasi oleh Pulau Jawa. Pulau Jawa berpeluang besar memiliki kasus kriminalitas tinggi karena Pulau Jawa merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan populasi terpadat. Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah kasus tindak kriminalitas cukup tinggi dengan total kasus sebanyak 60 ribu lebih pada tahun 2022 merupakan peningkatan 2 kali lipat dari tahun 2018 yaitu

sebanyak 30 ribu lebih kasus. Berikut gambar 1.1 menunjukkan jumlah kasus kriminalitas di Provinsi Jawa Timur periode tahun 2018 – 2022.

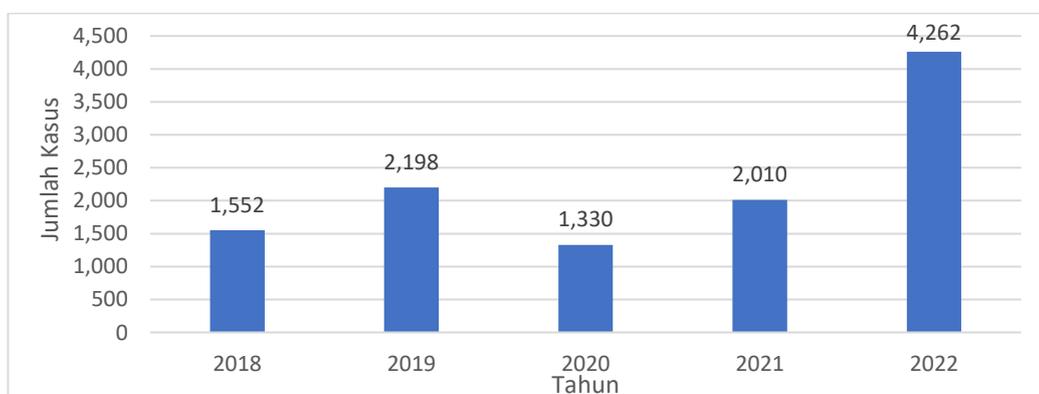
Gambar 1. 1 Jumlah Kasus Kriminalitas Provinsi Jawa Timur, 2018 – 2022 (Kasus)



Sumber: Statistik Kriminalitas Jawa Timur (diolah)

Gambar 1.1 menunjukkan fluktuasi jumlah kasus kriminalitas di Provinsi Jawa Timur. Peningkatan jumlah kasus kriminalitas terbanyak pada tahun 2022, dengan jumlah kasus sebanyak 60.236 kasus. Angka tersebut meningkat hampir 3 kali lipat dari tahun 2021 sebesar 24.844 kasus. Adanya peningkatan jumlah kasus kriminalitas tersebut perlu diberikan upaya penanggulangan untuk mengurangi dan memberantas kasus kriminalitas di Provinsi Jawa Timur.

Gambar 1. 2 Jumlah Kasus Kriminalitas Properti Provinsi Jawa Timur, 2018 – 2022 (Kasus)

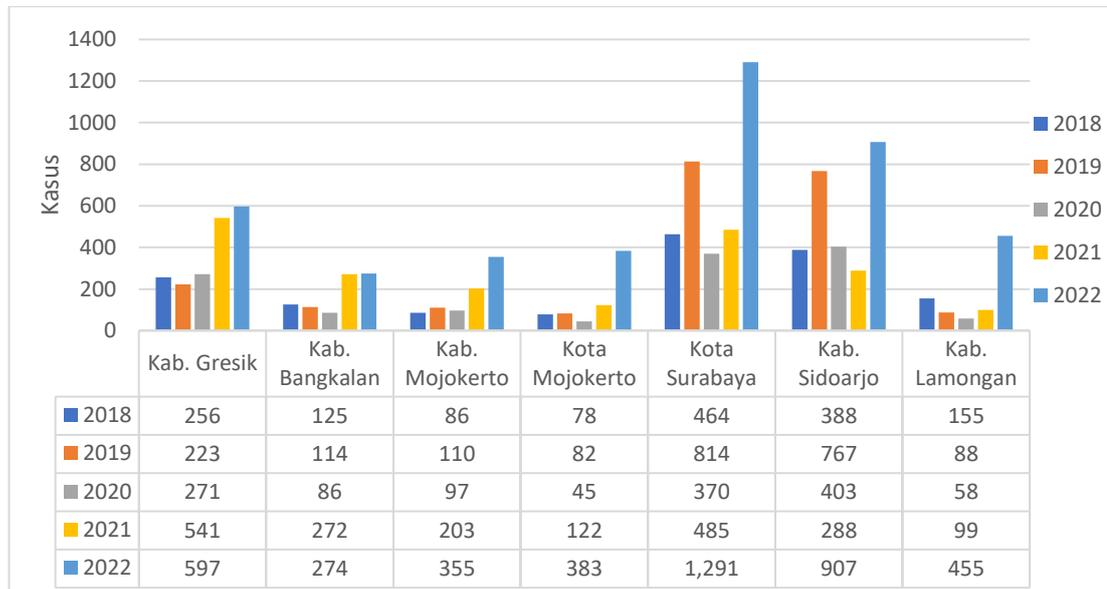


Sumber: Statistik Kriminalitas Jawa Timur (diolah)

Kasus kriminalitas properti berupa pencurian kendaraan bermotor atau curanmor kerap terjadi di Provinsi Jawa Timur. Segala upaya dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat juga sulit untuk mengurangi kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Pada Gambar 1.2 merupakan data kasus kriminalitas properti seperti pencurian, perampokan, dan penipuan baik menggunakan maupun tidak menggunakan kekerasan. Jumlah kasus kriminalitas properti tertinggi ada pada tahun 2022 dengan total kasus sebanyak 4.262 kasus. Angka tersebut meningkat 2x lipat daripada tahun 2021 yaitu sebanyak 2.010 kasus.

Provinsi Jawa Timur terbagi atas 38 kota dan kabupaten memiliki wilayah metropolitan atau biasa disebut wilayah Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidorarjo, Lamongan). Wilayah Gerbangkertosusila merupakan kawasan metropolitan terbesar setelah Wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) dalam hal kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk menjadikan wilayah-wilayah tersebut memiliki masalah sosial seperti kriminalitas akibat beberapa faktor seperti kemiskinan, pengangguran, pendidikan, maupun faktor sosial dan ekonomi lainnya. Berikut gambar 1.3 menunjukkan jumlah kasus kriminalitas properti di Wilayah Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidorarjo, Lamongan) periode tahun 2018 – 2022.

Gambar 1. 3 Jumlah Kasus Kriminalitas Properti Wilayah Gerbangkertosusila, 2018 – 2022 (Kasus)



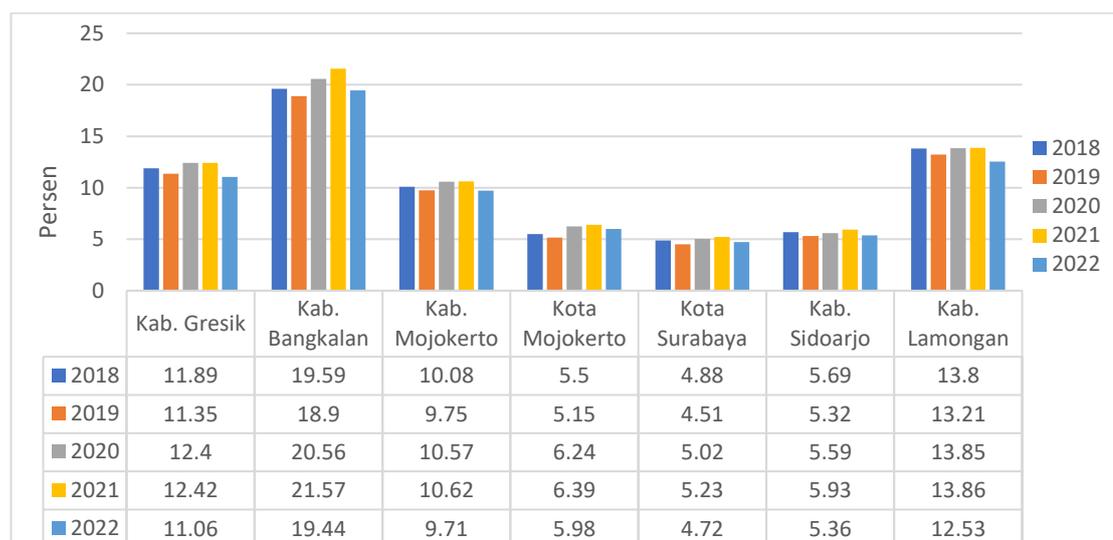
Sumber: Statistik Kriminalitas Jawa Timur (diolah)

Pada gambar 1.3 menunjukkan bahwa Kota Surabaya menempati posisi pertama dengan kasus kriminalitas properti terbanyak selama tahun 2018 - 2022. Namun pada tahun 2020 Kota Sidoarjo menempati posisi pertama dengan kasus kriminalitas properti terbanyak yaitu 403 kasus. Selain itu, wilayah lain seperti Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, dan Kabupaten Lamongan memiliki jumlah kasus kriminalitas properti tergolong rendah dibandingkan dengan kasus kriminalitas Kota Surabaya dan Kota Sidoarjo.

Perbedaan jumlah kasus antara kota/kabupaten besar dengan kabupaten kecil karena adanya konsep wilayah aglomerasi dan menyebabkan terjadinya mobilitas atau perpindahan penduduk dari Kawasan atau kabupaten yang tergolong kecil ke kota atau kabupaten besar seperti Kota Surabaya dan Kota Sidoarjo.

Kriminalitas sangat kerap dikaitkan dengan beberapa faktor atau permasalahan sosial lain seperti kemiskinan, pengangguran (Yulia Purwanti dkk., 2019), dan pendidikan. Kriminalitas umumnya disebabkan langsung oleh masalah ekonomi dalam memenuhi kebutuhan, sedikitnya lapangan kerja, dan rendahnya kemampuan sumber daya manusia karena kurang pendidikan (Fachrurrozi dkk., 2021). Dalam mengurangi maupun mengendalikan tindak kriminalitas perlu adanya penuntasan terlebih dahulu dalam masalah kemiskinan, pengangguran, maupun pendidikan yang ada.

Gambar 1. 4 Tingkat Kemiskinan Wilayah Gerbangkertosusila, 2018 – 2022 (Persen)



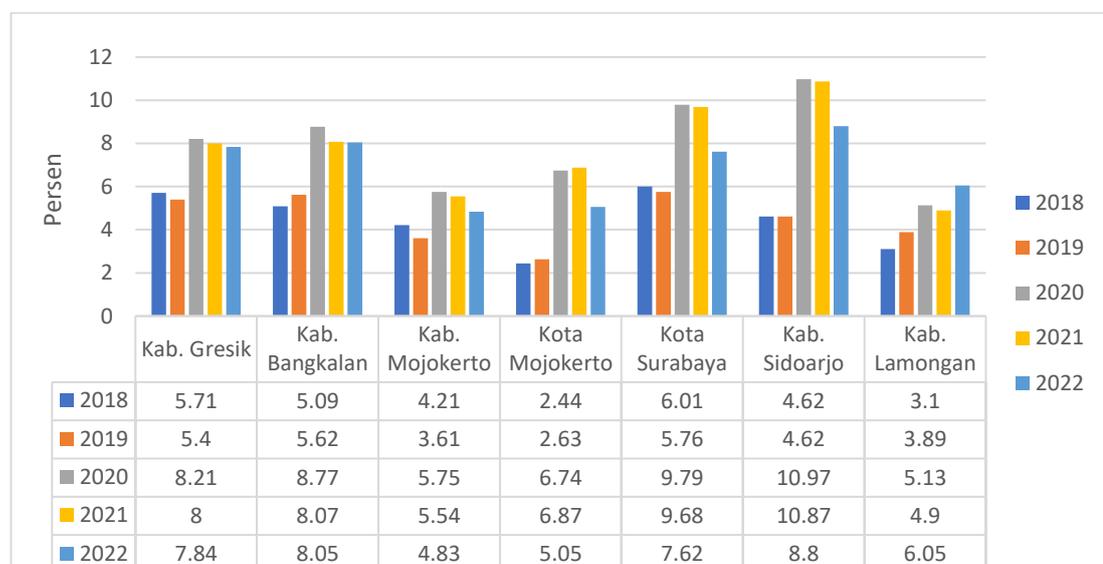
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur (diolah)

Gambar 1.4 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Bangkalan memiliki persentase tertinggi selama 5 tahun terakhir dibandingkan dengan Kabupaten Gresik, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kota Sidoarjo, dan Kabupaten Lamongan. Persentase kemiskinan di Kabupaten Bangkalan setiap tahun mengalami fluktuasi dengan persentase tertinggi pada tahun 2021 yaitu 21.57%. Kota Surabaya memiliki tingkat

kemiskinan terendah dibandingkan wilayah lain dengan persentase kemiskinan yang berfluktuasi setiap tahun. Sama dengan Kabupaten Bangkalan, tingkat kemiskinan tertinggi di Kota Surabaya adalah pada tahun 2021 dengan persentase sebesar 5.23%. Jika dibandingkan, tingkat kemiskinan antara Kabupaten Bangkalan dan Kota Surabaya memiliki perbedaan besar.

Tidak hanya pada Kabupaten Bangkalan dan Kota Surabaya saja, persentase kemiskinan tertinggi pada wilayah lain (Kabupaten Gresik, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Lamongan) juga pada tahun 2021. Imbas kemiskinan pada tahun 2021 diakibatkan faktor pemulihan dari pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Banyak korban PHK karena penurunan dari pihak pemberi pekerjaan. Pada tahun 2022 menunjukkan penurunan persentase kemiskinan di seluruh wilayah kota dan kabupaten Gerbangkertosusila. Penurunan persentase tersebut menunjukkan reaksi positif atas keberhasilan penurunan tingkat kemiskinan di wilayah Gerbangkertosusila.

Gambar 1. 5 Tingkat Pengangguran Wilayah Gerbangkertosusila, 2018 – 2022 (Persen)



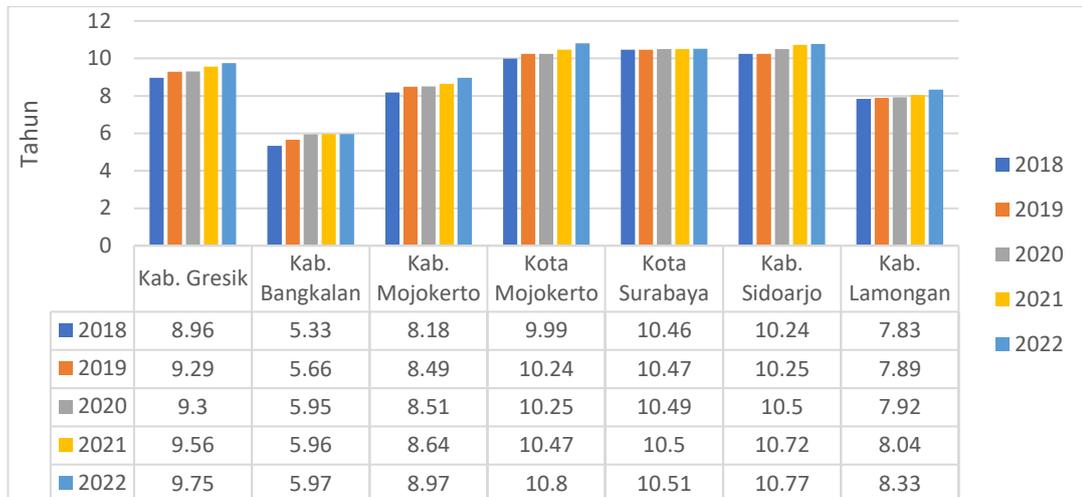
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur (diolah)

Gambar 1.5 menunjukkan bahwa Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya merupakan wilayah dengan persentase tingkat pengangguran tertinggi selama 5 tahun terakhir dibandingkan dengan Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, dan Kabupaten Lamongan. Tingkat pengangguran tertinggi di Kota Surabaya pada tahun 2018 dan 2019, yaitu sebesar 6.01% dan 5.76%. Sedangkan Tingkat pengangguran tertinggi di Kota Sidoarjo memiliki tingkat pengangguran tertinggi pada tahun 2020 – 2022 dengan persentase berturut-turut sebesar 10.97%, 10.87%, dan 8.8%.

Pada wilayah lain yaitu Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, dan Kabupaten Lamongan juga memiliki persentase pengangguran tinggi antara tahun 2020 - 2022. Imbas pengangguran diakibatkan faktor pemulihan dari pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Banyak korban PHK karena penurunan dari pihak pemberi pekerjaan. Pada tahun 2022 menunjukkan penurunan persentase pengangguran di seluruh wilayah kota dan kabupaten Gerbangkertosusila. Penurunan persentase tersebut menunjukkan reaksi positif atas keberhasilan penurunan tingkat pengangguran di wilayah Gerbangkertosusila.

Menurut BPS, penurunan tingkat pengangguran saat ini adalah kontribusi generasi muda atau angkatan kerja yang baru menyelesaikan pendidikan. Generasi muda saat ini dapat membuka dan mengembangkan bisnis atau usaha sendiri baik dalam bidang makanan, teknologi, jasa, dan lain sebagainya (Rahmalia dkk., 2019). Selain menurunkan tingkat pengangguran, peran atau kontribusi dari generasi muda secara tidak langsung memberikan lapangan pekerjaan bagi pengangguran lainnya.

Gambar 1. 6 Rata-Rata Lama Pendidikan Wilayah Gerbangkertosusila, 2018 – 2022 (Tahun)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur (diolah)

Gambar 1.6 menunjukkan bahwa rata-rata lama pendidikan masyarakat di wilayah Gerbangkertosusila setiap tahun selalu meningkat. Rata-rata lama pendidikan masyarakat di Kabupaten Bangkalan memiliki persentase paling rendah jika dibandingkan dengan wilayah lain yaitu Kabupaten Gresik, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Lamongan. Sedangkan Kota Mojokerto, Kota Surabaya, dan Kota Sidoarjo memiliki rata-rata lama pendidikan masyarakat hampir sama setiap tahun dengan rata-rata lama pendidikan yaitu 10 tahun.

Peningkatan rata-rata lama pendidikan setiap tahun juga memberikan reaksi positif dalam hal pendidikan di wilayah Gerbangkertosusila. Meskipun peningkatan rata-rata lama sekolah tidak menunjukkan 1 tahun, namun bisa menunjukkan bahwa banyak masyarakat menempuh pendidikan tidak hanya sampai Sekolah Menengah Pertama atau SMP saja. Kesadaran pendidikan ini merupakan fenomena positif dan diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia berkualitas.

Kemiskinan, pengangguran, dan pendidikan merupakan beberapa faktor yang diasumsikan mempengaruhi kriminalitas di suatu negara maupun wilayah. Oleh karena itu, peneliti ingin mencari jawaban mengenai dampak tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan rata-rata lama pendidikan terhadap kriminalitas properti di Wilayah Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan) yang sebelumnya belum pernah dibahas oleh peneliti lain dengan objek, tempat, dan waktu yang sama. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, dan Rata-rata Lama Sekolah terhadap Kriminalitas Properti di di Wilayah Gerbangkertosusila”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Tingkat Kemiskinan berpengaruh terhadap Jumlah Kasus Kriminalitas Properti di Wilayah Gerbangkertosusila?
2. Apakah Tingkat Pengangguran berpengaruh terhadap Jumlah Kasus Kriminalitas Properti di Wilayah Gerbangkertosusila?
3. Apakah Rata-Rata Lama Sekolah berpengaruh terhadap Jumlah Kasus Kriminalitas Properti di Wilayah Gerbangkertosusila?
4. Apakah Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, dan Rata-Rata Lama Sekolah secara bersama-sama mempengaruhi Jumlah Kasus Kriminalitas Properti di Wilayah Gerbangkertosusila?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap Jumlah Kasus Kriminalitas Properti di Wilayah Gerbangkertosusila

2. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Jumlah Kasus Kriminalitas Properti di Wilayah Gerbangkertosusila.
3. Untuk mengetahui pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Jumlah Kasus Kriminalitas Properti di Wilayah Gerbangkertosusila.
4. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, dan Rata-Rata Lama Sekolah secara bersama-sama terhadap Jumlah Kasus Kriminalitas Properti di Wilayah Gerbangkertosusila.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapat melalui Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur dan Statistik Kriminalitas Jawa Timur pada periode tahun 2018 – 2022. Dianalisis menggunakan metode Analisis Regresi Data Panel dan Regresi Linier Berganda.

Ruang lingkup penelitian ini digunakan untuk menguraikan kasus kriminalitas di Wilayah Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan) dengan menggunakan variabel Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, dan Rata-Rata Lama Sekolah sebagai Variabel Bebas (*Independent*) dan variabel Kriminalitas Properti sebagai Variabel Terikat (*Dependen*) sebagai alat ukur.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi mahasiswa

Sebagai referensi dan edukasi untuk memperluas wawasan tentang variable-variabel yang dibahas dalam penelitian

2. Bagi pemerintah

Sebagai informasi agar pemerintah dapat melakukan perbaikan dan kebijakan untuk mengatasi masalah-masalah yang dibahas yaitu mengenai kriminalitas, kemiskinan, pengangguran dan pendidikan.